Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	5

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

Kasus RSSW, Waspadai 'Tebang Pilih"

Demokrat Jakarta: Temuan BPK Wajib Ditindaklanjuti

SEKRETARIS Komisi Pengawas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta R Faisal mendesak aparat hukum tidak tebang pilih dalam dugaan korupsi atas pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) senilai Rp 800 miliar.

Terlebih bukti-bukti kuat berdasarkan temun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menjurus ke arah penyimpangan. Terdapat indikasi kerugian daerah mencapai Rp 191 miliar akibat kelebihan pembayaran atas lahan dimaksud.

"Saat ini masyarakat menunggu tindakan dari penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan BPK terkait dugaan korupsi Sumber Waras. Jadi kami minta jangan sampai aparat main-main dan tebang pilih," ujar Faisal kepada INDOPOS, kemarin (1/9).

Bila temuan BPK tak ditindaklanjuti, sambung Faisal, maka kepercayaan publik kepada penegak hukum akan berkurang. Kemudian mereka akan menilai penegak hukum tunduk kepada penguasa, dan memilih-milih kasus yang ingin ditangani.

"Apa gunanya BPK kalau hasil temuannya tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Jangan sampai ada pikiran buruk membubarkan BPK saja, karena hasil kerja mereka tidak dihargai dan tidak ditindaklanjuti. Kami inginkan penegakan hukum yang adil yang tidak pandang bulu dan tebang pilih," tegas kader partai besutan SBY itu.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit investigasi terkait dugaan korupsi pembelian lahan tersebut. seperti diketahui bahwa temuan itu terungkap setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas APBD 2014 diserahkan Pemprov DKI Jakarta.

Audit BPK akan dijadikan landasan bagi KPK untuk melakukan pendalaman terkait dugaan terjadinya korupsi. "KPK sudah minta kepada BPK untuk lakukan kajian audit investigasi terhadap proses peralihan dan kemungkinan ada tidaknya penyimpangan terhadap keuangan negara, kami masih menunggu BPK," kata Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji.

Indriyanto mengatakan, saat ini baru ada laporan audit dari BPK. Laporan itu, menurut dia, berbeda dengan audit investigasi. Audit investigasi bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan.

Belakangan ini, terdapat masyarakat yang berinisiatif melaporkan hasil investigasi dengan berkas LHP BPK ke KPK. Yakni Amir Hamzah dan Sugiyanto yang secara bergantian melaporkan Pemprov DKI Jakarta ke KPK.

"Ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basui Tjahaja Purnama (Ahok) dan kemungkinan korupsi dalam kasus (pembelian) tanah (RS) Sumber Waras," tandas Amir.

Sementara itu, Sugiyanto menegaskan bahwa kerugian yang dialami Pemprov DKI atas persoalan itu bukan sebesar Rp 191 miliar, melainkan sebesar Rp 800 miliar. Sebab uang yang ditransfer dari Bank DKI ke Dinas Kesehatan sebagai pembeli lahan adalah Rp 800 miliar.

"Pemprov DKI Jakarta punya banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk apa membeli lahan untuk bangun rumah sakit. Ini sama saja akal-akalan menghabiskan uang rakyat. Jadi saya berani katakana, kerugiannya mencapai Rp 800 milair," tegas Sugiyanto. (wok)

SUBBAGIAN HUMAS

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	5

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

PEMBELIAN LAHAN MILIK RSSW

- Gunakan Anggaran 2014
- Pembelian lahan RSSW seluas 3,7 hektare
- Untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung

PENILAIAN BPK

- Pembelian merugikan Pemprov DKI Jakarta
- Selisih harga, ada perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RSSW dengan lahan rumah sakit itu sendiri
- Terindikasi penggelembungan harga pada pembelian tanah